



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Dua Kabupaten Disoroti KPK

Banyak Catatan!

BENGKULU - Dalam rangka merevitalisasi koordinasi Pemberantasan korupsi di Provinsi Bengkulu, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Pola Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (20/6).

Pada rakor ini, KPK RI lebih memfokuskan atau piloting, di Kabupaten Lebong. Berdasarkan keterangan, Kepala Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan (Kasatgas Korgah) KPK Wilayah Maruli Tua Manurung, ada cukup banyak catatan bagi Kabupaten Lebong.

"Beberapa hal penting harus



BELA/RB

RAKOR: Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Provinsi Bengkulu, di Ruang Pola Provinsi Bengkulu.

diperbuat supaya pencegahan korupsi bukan makin mundur, tetapi makin kuat," ujarnya.

Piloting ini dilakukan di Kabupaten Lebong karena,

Monitoring Center for Prevention (MCP) dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan sebanyak 8 poin.

☞ Baca **DUA**...Hal 15

Sambungan dari hal 9

Begitu juga dengan hasil survei integritasnya juga turun sekitar 4 poin. Selain itu, jelasnya, masih ada beberapa permasalahan yang belum baik termasuk pada sisi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum kuat.

"Kami tegaskan kepada Bupati Lebong untuk memperkuat APIP-nya, karena APIP adalah garda terdepan dalam mencegah perburuan korupsi di pemerintah daerah," ujarnya.

Tidka hanya itu, Maruli juga berpesan untuk me-

mintakan Kabupaten Lebong untuk memperkuat Unit Pelayanan Barang dan Jasa (UPBJ). Agar dapat lebih optimal dalam memonitoring kegiatan proyek yang ada di pemerintah sehingga dapat menekan tindakan korupsi.

"KPK juga mendorong optimal pengelolaan BUMD-nya dan pengelolaan aset daerah," ungkapnya.

Untuk itu, Maruli Tua menekankan agar seluruh pejabat di pemerintah daerah untuk terus menegaskan kepada jajaran untuk benar-benar fokus dalam upaya memberantas korupsi terlebih lagi pada tahun politik ini.

"KPK mengambil dua kabupaten sebagai piloting pemberantasan korupsi di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Jadi, selain Kabupaten Lebong dan Kabupaten Seluma," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, H. Nandar Munadi, S.Sos, M.Si mengatakan, Kabupaten Lebong dan Seluma menjadi sorotan KPK karena angka

MCP-nya rendah. Sehingga perlu dilakukan supervisi pemberantasan korupsi.

"Untuk itulah dilakukan Rakor agar melihat gambaran dari hasil MCP KPK di Kabupaten Lebong," ujarnya.

Selain melihat gambaran, tambahnya juga menjadi upaya meningkatkan dan pencegahan korupsi di Provinsi Bengkulu. Termasuk rencana aksi yang diharapkan ke depannya ada perubahan.

"Keterlibatan Pemprov dalam rakor ini yaitu untuk mengatensi dan mengasistensi program yang ada di seluruh kabupaten. Tekhususnya hari ini untuk Kabupaten Lebong," terangnya.

Di sisi lain, usai pelaksanaan Rakor yang juga diikuti oleh Bupati Lebong. Saat dimintai keterangan dan konfirmasi, Bupati Lebong tampak terburu-buru. Dan mempersilakan para awak media untuk mendahulukan pihak KPK. Setelahnya, dia meninggalkan lokasi rapat. **(bil)**